



BAGIAN ANGGARAN 005.03.400173
PENGADILAN NEGERI BANTUL
DITJEND. BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL

TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

PERIODE 31 DESEMBER 2023



Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04
Telp. 0274367348 Fax. 0274367348
Bantul - DI Yogyakarta 55711 e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
Kode Satker 400173

BAGIAN ANGGARAN 005.03
DITJEND. BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04
Telp. 0274367348 Fax. 0274367348
Bantul - DI Yogyakarta 55711
e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 13 Februari 2024
SEKRETARIS

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak
NIP. 19790822 200502 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	46
Lampiran berupa cetakan dari aplikasi SAKTI	
1. Laporan Realisasi Anggaran	
2. Laporan Realisasi Belanja	
3. Laporan Realisasi Pendapatan	

4. Neraca Percobaan
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Neraca
8. Lampiran Pendukung Lainnya

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	3
Tabel Neraca Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	4
Tabel Laporan Operasional Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	5
Tabel Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2023	6
Tabel Rekapitulasi Satker	8
Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang	12
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-Belanja	17
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember Tahun 2023	17
Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	18
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA. 2023	18
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	19
Tabel Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	20
Tabel Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	21
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	21
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	22
Tabel Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2022	23
Tabel Mutasi Nilai Tanah Per 31 Desember 2023	23
Tabel Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023	25
Tabel Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023	26
Tabel Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023	28
Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023	28
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
Tabel Mutasi Transaksi Terhadap Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023	30
Tabel Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023	30
Tabel Mutasi Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023	30
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	31
Tabel Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Akun	31
Tabel Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2023	32
Tabel Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2023	33
Tabel Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2023	34
Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023	34
Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023	35

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023	33
Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023	36
Tabel Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023	36
Tabel Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2023	37
Tabel Rincian Transaksi Antar Entitas	39



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No.4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax.
(0274)367348

Laman: www.pn-bantul.go.id, Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

SEKRETARIS

Pengadilan Negeri Bantul

Yuyun Fithriyah, S.E.,Ak
NIP. 19790822 200502 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.53.995.000 atau mencapai 104 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.52.149.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp.132.601.460 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.132.700.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.2.987.300 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.2.987.300; Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.2.987.300.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.53.995.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.136.132.234 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.82.137.234). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit sebelum Pos-Pos

Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan (Rp.82.137.234) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp.82.137.234).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.501.750 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp.82.137.234) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp.84.622.784 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar (Rp.2.485.550) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.2.987.300.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23		% thd Angg	31-Des-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	52.149.000	53.995.000	104	52.033.000
JUMLAH PENDAPATAN		52.149.000	53.995.000	104	52.033.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0
Belanja Barang	B.4	132.700.000	132.601.460	100	136.919.842
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		132.700.000	132.601.460	100	136.919.842

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI BANTUL NERACA PER 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23	31-Des-2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0	0
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	0	0
Persediaan	C.10	2.987.300	501.750
Jumlah Aset Lancar		2.987.300	501.750
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.14	0	0
Peralatan dan Mesin	C.15	0	0
Gedung dan Bangunan	C.16	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.18	0	0
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	0	0
Aset Lain-Lain	C.22	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		2.987.300	501.750
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	2.987.300	501.750
JUMLAH EKUITAS		2.987.300	501.750
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.987.300	501.750

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN OPERASIONAL PER 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23	31-Des-21
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	53.995.000	52.033.000
JUMLAH PENDAPATAN		53.995.000	52.033.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	27.785.574	42.072.268
Beban Barang dan Jasa	D.4	87.506.660	87.432.342
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	20.840.000	23.200.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		136.132.234	152.704.610
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(82.137.234)	(100.671.610)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		-	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	0
Defisit Selisih Kurs		-	0
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(82.137.234)	(100.671.610)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(82.137.234)	(100.671.610)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI BANTULLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23	31-Des-21
EKUITAS AWAL	E.1	501.750	9.849.300
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(82.137.234)	(100.671.610)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	84.622.784	91.324.060
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(2.485.550)	(9.347.550)
EKUITAS AKHIR	E.6	2.987.300	501.750

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN UMUM****A.1. Dasar Hukum**

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Badan Akun Standar
14. PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19
15. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal tindak lanjut Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
16. PMK Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Penyusunan Laporan Keuangan Semester I untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas

Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA)

17. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian LKKL Semester II Tahun 2023.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Wilayah Pengadilan Negeri Bantul

Profil dan
kebijakan
Teknis Unit
Wilayah
Pengadilan
Negeri
Bantul

Pengadilan Negeri Bantul merupakan satuan kerja yang mempunyai tupoksi menyelenggarakan Peradilan Perdata Islam dan Ekonomi Syariah pada Tingkat Banding di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung RI, dan berlokasi di Jl. Prof Wirjono Prodjodikoro (Dongkelan) No.321 Dongkelan Yogyakarta. Sebagai satuan kerja pemerintah tentunya juga memiliki kewajiban sebagai entitas pelaporan akuntansi penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk Laporan Keuangan Tingkat Wilayah yang akuntabilitas dan transparan.

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang luhur, bermartabat dan berwibawa. Visi Pengadilan Negeri Bantul tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Yogyakarta dalam melakukan aktivitasnya.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kredibilitas aparat penegak hukum sebagai penegak hukum yang profesional ;
- b. Meningkatkan moral aparatur Pengadilan Agama ;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan;
- e. Meningkatkan pengawasan aparatur Pengadilan Agama, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis ,adapun arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tingkat Banding secara sederhana, cepat, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan (Acces to Justice) di Pengadilan Negeri Bantul;
3. Melanjutkan implementasi reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Bantul;

4. Meningkatkan penguatan pengawasan implementasi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan aparatur Pengadilan Negeri Bantul yang bersih dan bebas KKN.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Bantul.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II per 31 Desember TA 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Bantul. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai perkembangan teknologi dan aturan saat ini aplikasi SAIBA-SIMAK dan Persediaan sudah tidak digunakan lagi saat ini digunakan aplikasi web base yaitu SAKTI dan MONSAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Bantul menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Bantul dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

*Dasar
Pengukuran*

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Dasar
Pengukuran

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Unit Eselon I Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan sewa Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan
 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya seperti Penjualan Aset Tetap
 - Pendapatan dari Pemanfaatan BMN seperti Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan dari Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah seperti Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
- Pendapatan Anggaran Lain-lain
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2007 dan 2018.
 - Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Jalan, Jaringan dan Irigasi	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud (ATB)

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

A.7. Kebijakan Mahkamah Agung dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Mahkamah Agung menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait penggunaan segmen akun khusus yang tepat dalam rangka belanja keperluan penanganan COVID-19 serta implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangannya:

- 1) Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-536/PB/2020 tanggal 23 Juni dan S-555/PB/2020 tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1007/SEK/KU.00/7/2020 tanggal 1 Juli 2020 hal Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2020 poin 24 menyatakan sesuai S-536/PB/2020 tanggal 23 Juni 2020 Satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk mengajukan revisi dan ralat dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran yang telah merealisasi belanja terkait akun penanganan pandemi COVID-19 ke akun seharusnya sesuai Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 28. Hal ini bertujuan dalam rangka menjaga kesesuaian Bagan Akun Standar sesuai peruntukannya dan meminimalisir melakukan jurnal penyesuaian manual melalui Aplikasi SAIBA.
- 2) Menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020, ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1187/SEK/KU.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 hal Pemuthakiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yang menyatakan:
 - a) Dengan adanya ketentuan pemuthakiran segmen akun khusus COVID-19, maka Satuan Kerja dalam melakukan perencanaan/ pengalokasian/ revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19
 - b) Dalam hal Satuan Kerja telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19 maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi

belanja (SPM/SP2D)

- c) Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat sebagaimana angka 2, agar Satuan Kerja berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Mitra Kerja pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN dan tidak menyebabkan pagu minus
- i. Apabila pagu anggaran belanja barang (52) dan belanja modal (53) telah terealisasi seluruhnya dan Satuan Kerja mengalami kesulitan dalam proses revisi anggaran dapat mengajukan surat kepada Sekretaris Mahkamah Agung Cq. Kepala Biro Keuangan dengan melampirkan matriks pergeseran dan Laporan Realisasi Anggaran
- ii. Apabila sampai dengan batas akhir pengajuan revisi anggaran tidak mendapat pengesahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau tidak mendapat alokasi pergeseran anggaran dari pusat maka Satuan Kerja melakukan Jurnal Penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA.

Contoh kasus:

Terdapat realisasi belanja pembelian masker menggunakan akun 521111 tidak dapat dilakukan revisi dan ralat ke akun COVID-19 lakukan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521131	Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	XXX	Laporan Operasional
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		Laporan Operasional

Terdapat realisasi belanja pembelian *thermogun* diatas nilai kapitalisasi menggunakan akun 521111 dan diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	XXX	Neraca
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran	XXX	Laporan Operasional

- d) Satuan Kerja diminta melaporkan realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun lama dan belum melakukan pemuthakiran akun COVID-19 melalui format dalam bit.ly/Penjelasan_Akun_Covid19
- e) Dalam hal terdapat pertanyaan/permasalahan terkait dengan penggunaan dan penjelasan akun khusus COVID-19 maka dapat menyampaikan pertanyaan melalui bit.ly/Penjelasan_Akun_Covid19.

A.8. Capaian Output

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada Laporan Keuangan ini tidak terdapat Output Strategis karena berada pada Bagian Anggaran Dirjen Badan Peradilan Umum (03), sedangkan Laporan ini merupakan Bagian Anggaran dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.03). Berikut Capaian Output Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2023 diambil dari SMART.

No	Kode Satker	Nama Satker	Program/ Kegiatan/ Output	Realisasi Anggaran	Persentas e Realisasi Anggaran	Rencana Output	Realisasi Output	Satuan Output	Persenta se Capaian Output
1	400173	Pengadilan Negeri Bantul	BF.1049.AEA.001	7.498.850	99,98	6	6	Kegiatan	99,98
			BF.1049.BCA.U03	98.220.992	99,98	250	250	Perkara	99,98
			BF.1049.QBA.032	31.200.000	100	312	312	Orang	100

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja yang ada di Kantor Wilayah Pengadilan Negeri Bantul telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disesuaikan dengan program belanja pemerintah serta dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yaitu terdapat revisi antar satker berupa Belanja Barang akun 522141 Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim. Pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-Belanja
 Per 31 Desember 2023*

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan PNB	52.149.000	52.149.000
Jumlah Pendapatan	52.149.000	52.149.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	132.700.000	132.700.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	132.700.000	132.700.000

*Realisasi Pendapatan
 Rp.53.995.000*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.53.995.000 atau mencapai 104 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.52.149.000. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-Lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan-Belanja Tahun 2023

Uraian	31-Des-23		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	140.000	110.000	71,43
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	5.720.000	2.690.000	75,87
Pendapatan Ongkos Perkara	22.940.000	11.645.000	48,98
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	33.441.000	39.550.000	108,72
Jumlah	52.149.000	53.995.000	104

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,77% hal ini disebabkan karena jumlah perkara yang masuk ke kantor Pengadilan Negeri Bantul lebih banyak dibandingkan dengan Tahun yang lalu hal terlihat dari pendapatan ongkos perkara yang naik cukup banyak.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	110.000	100.000	10,00
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.690.000	4.340.000	(38,02)
Pendapatan Ongkos Perkara	11.645.000	11.235.000	3,65
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	39.550.000	36.358.000	8,78
Jumlah	53.995.000	52.033.000	3,77

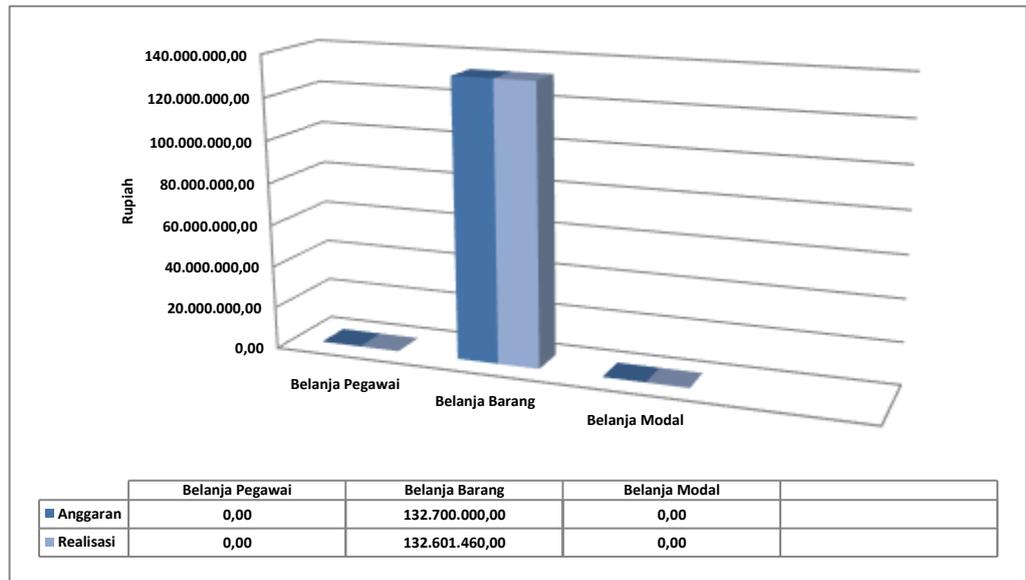
B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp.132.601.460*

Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.132.601.460 atau 99,98 % dari Anggaran Belanja sebesar Rp.132.700.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komposisi Anggaran dan Realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 penurunan sebesar 3,15% dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	132.601.460,00	136.919.842,00	(3,15)
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah	132.601.460	136.919.842	(3,15)

Hal ini disebabkan antara lain :

Anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2023 ini lebih kecil dari pada anggaran pada Tahun 2022, walaupun Semua program anggaran dapat dilaksanakan dengan baik serta telah sinerginya antara pengelola keuangan dengan bagian kepaniteraan dengan baik sehingga mampu merealisasikan semua anggaran dengan baik dan tepat.

Belanja Pegawai
Rp.0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pada anggaran DIPA BADILUM ini tidak terdapat anggaran Belanja Pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Uang Makan PNS	0	0	-
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.132.601.460 dan Rp.136.919.842. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 naik sebesar 5,59 % dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2022.

Belanja Barang
Rp.132.601.460

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.130.000	2.130.000	51,17
Belanja Barang Non Operasional	54.102.342	54.102.342	4,97
Belanja Barang Persediaan	26.287.500	26.287.500	(17,54)
Belanja Jasa	31.200.000	31.200.000	0
Belanja Pemeliharaan			77,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20.840.000	23.200.000	35,57
Jumlah Belanja Kotor	132.601.460	136.919.842	5,59
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	132.601.460	136.919.842	5,59

Hal ini antara lain disebabkan :

1. Anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2023 ini lebih besar dari pada anggaran pada Tahun 2022,
2. Semua program anggaran dapat dilaksanakan dengan baik serta telah sinerginya antara pengelola keuangan dengan bagian kepaniteraan dengan baik sehingga mampu merealisasikan semua anggaran dengan baik dan tepat.

Belanja Modal
Rp.0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pada anggaran DIPA BADILUM ini tidak terdapat anggaran Belanja Pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada anggaran DIPA BADILUM ini tidak terdapat anggaran Belanja Pegawai.

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp.0

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pembelian Peralatan Mesin	0	0	0,00
Belanja penambahan nilai peralatan mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada anggaran DIPA BADILUM ini tidak terdapat anggaran Belanja Pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-Des-23	31 Des 2022
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP/TUP	0	0
Rekening Virtual Bank BRI No.6532454100571000	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak
Rp.0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPN berasal dari Sewa Rumah Dinas dan Mess Hakim yang telah dipotong dengan SPM Gaji Induk Bulan Juli 2023 yang telah dibuat dan pada bulan September 2023 sehingga muncul Piutang Bukan Pajak yang disajikan sebagai berikut

Rincian Piutang PNBPN per 31 Desember TA 2023 dan 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang PNBPN	0	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	0	

Nilai Persediaan
Rp.2.987.300

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.2.987.300 dan Rp.501.750.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
 Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Persediaan	31-Des-23	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	2.987.300	501.750
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
Jumlah	2.987.300	501.750

Semua persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik senilai Rp.2.987.300 dan telah diopname fisik tanggal 31 Desember 2023 Nomor : W13.U5/3514/OT.01.2/XII/2023.

Tanah Rp.0

C.4 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah pada wilayah Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0. Tabel mutasi tanah pada lingkup Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Hibah (Masuk)	0
Koreksi Kesalahan input IP (Revaluasi)	0
Mutasi kurang:	
Hibah (Keluar)	-
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2023

N	KIB	Luas	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
o		(m ²)				
1.						
2.						
Jumlah						

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp.0

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi nilai peralatan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	0
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	0
Perolehan Lainnya	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	0

Tidak terdapat belanja pada DIPA BADILUM.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp.0

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Tidak terdapat belanja pada DIPA BADILUM.

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Rp.0

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Tabel Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Tidak terdapat belanja pada DIPA BADILUM.

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
 Rp.0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetaptersebut berupa barang bercorak kesenian dan buku perpustakaan (monografi).

Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Tidak terdapat belanja pada DIPA BADILUM.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
Jumlah		-		-	

Tidak terdapat Pengembangan Melalui KDP .

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp.0

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menggunakan data per 31 Desember 2023. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Gedung dan Bangunan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Akumulasi Penyusutan		Rp 0	Rp 0	Rp 0

Tidak terdapat belanja pada DIPA BADILUM.

Aset Tak Berwujud Rp.0. **C.11 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud terdapat pada Satker Pengadilan Negeri Bantul sebesar Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software	-
Lisensi	-
Jumlah	-

Aset Lain-lain Rp.0

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Wilayah Pengadilan Negeri Bantul. Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	0
Reklas Masuk dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Uang Muka dari KPPN
Rp.0

C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp.0

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Pengadilan Negeri Bantul tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp -
Total		Rp -

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp.0

C.15 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022*

Keterangan	31-Des-23	31 Des 2022
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp.2.987.300

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.987.300 dan Rp.501.750. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
 PNBP
 Rp.53.995.000

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.53.995.000 dan Rp.52.033.000.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
 Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	110.000	100.000	10,00
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.690.000	4.340.000	(42,64)
Pendapatan Ongkos Perkara	11.645.000	11.235.000	3,65
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	39.550.000	36.358.000	(18,72)
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	53.995.000	52.033.000	3,77

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp.53.995.000 periode yang berakhir 31 Desember 2023 berasal dari: pendapatan surat dibawah tangan, leges, ongkos perkara dan pendapatan peradilan lainnya.

Beban Pegawai
 Rp.0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Des 2023	PER 30 Des 2022	NAIK(TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan TNI/Polri	-	-	-
Jumlah Beban Pegawai Kotor	-	-	-
Pengembalian Beban Pegawai	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan
Rp.27.785.574

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.27.785.574 dan Rp.42.072.268. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	27.785.574	42.072.268	(33,96)
Jumlah Beban Persediaan	27.785.574	42.072.268	(33,96)

Beban Barang
dan Jasa
Rp.87.506.660

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.87.506.660 dan Rp.87.432.342. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.522.000	2.130.000	18,40
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pa	0	0	0,00
Beban Bahan	53.784.660	54.102.342	(0,59)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Beban Langganan Listrik	0	0	0,00
Beban Langganan Telepon	0	0	0,00
Beban Sewa	0	0	0,00
Beban Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	0,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa Kotor	87.506.660	87.432.342	0,09
Pengembalian Beban Belanja	0	0	0,00
Jumlah	87.506.660	87.432.342	0,09

Beban
Pemeliharaan
Rp.0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.20.840.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.20.840.000 dan Rp.23.200.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	0	3.300.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.840.000	19.900.000	4,72
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Kotor	20.840.000	23.200.000	(10,17)
Pengembalian Beban Perjalanan	0	0	0,00
Jumlah	20.840.000	23.200.000	(10,17)

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp.0

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi Lisensi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan	0	0	0.00

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Surplus Kegiatan Non Operasional Rp.0.

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 Rp.0 dan 31 Desember 2022 Rp.0.

Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	PER 31 Desember 2023	PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	91,42
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	91,42
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0	0	96,83

Pos Luar Biasa Rp.0

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.501.750.*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.501.750 dan Rp. 9.849.300.

*Defisit LO
(Rp.82.137.234)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp.82.137.234) dan (Rp.100.671.610). Defisit LO merupakan selisih kurang antarsurplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan nonoperasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Rp.0*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Merupakan koreksi pencatatan pada nilai persediaan. Untuk 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0.

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp.0.*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi Rp.0.*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp.0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp.84.622.784

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.84.622.784 dan Rp.91.324.060. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima Dari Entitas Lain	53.995.000
Ditagihkan ke Entitas Lain	132.601.460
Transfer Masuk	6.016.324
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	84.622.784

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp.53.995.000 sedangkan DKEL sebesar Rp.132.601.460.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL

dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0. Sedangkan untuk Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan pengembalian hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp.0.

*Ekuitas Akhir
Rp.2.987.300*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.987.300 dan Rp.501.750.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran 2023 ini.

F.2.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

F.2.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Virtual Account BRI Cabang Bantul 654444001731000 a.n. BPG 030 PN BANTUL 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0.
2. Bank Rakyat Indonesia 023601001792304 a.n. RPL 030 PN BANTUL KELAS 1B UTK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.060.428.965,-

F.2.4 PENGUNGKAPAN PENGELOLAAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA

1. Biaya Perkara

a. Uang panjar biaya perkara :

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan/ penyelesaian perkara mereka di pengadilan.

Dalam perkara Gugatan pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen*), *Staadblaad* tahun 1941 nomor 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*)

Staatblaad 1927 nomor 227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009.

Panjar biaya perkara ini terdiri dari :

- Biaya perkara seperti : biaya panggilan, biaya penyitaan.
- Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

b. Uang panjar biaya eksekusi putusan :

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi sebelumnya biaya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. Uang Konsinyasi :

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

Posisi Keuangan perkara per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Rekapitulasi Keuangan Perkara

Uraian	Dalam Bank	Dalam Brankas	Total
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Biaya Perkara	343.487.650	3.000.000	346.487.650
Biaya Eksekusi	542.168.490	5.889.610	548.058.100
Biaya Konsinyasi	174.772.825		174.772.825
Uang Titipan Perkara Pidana	0	0	0
PHI	0	0	0
Jumlah	1.060.428.965	8.889.610	1.069.318.575

Adapun mutasi Keuangan Perkara sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 1 Juli 2023	Rp. 1.005.601.875,00
Mutasi tambah:	
-Pendaftaran Perkara	Rp. 198.649.500,00
-Pendaftaran Eksekusi	Rp. 319.705.000,00
-Pendaftaran Konsinyasi	Rp. 0 ,00
Mutasi Kurang:	
-Biaya Perkara	Rp. 224.101.000,00
-Biaya Eksekusi	Rp. 230.536.600,00
-Biaya Konsinyasi	Rp. 0 ,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp. 1.069.318.575,00

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penambahan merupakan Panjar Biaya Perkara sebanyak 41 perkara gugatan, 13 perkara gugatan sederhana , 74 perkara permohonan, 4 perkara Eksekusi, 5 perkara eksekusi hak tanggungan, 8 perkara banding dan 7 perkara kasasi dan 1 perkara peninjauan kembali sebesar Rp. 5104.263.000,00
- b. Pengurangan merupakan biaya perkara sebesar Rp. 325.422.100,00 baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

2. Biaya Proses

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Bantul telah mengelola Biaya Proses yang dipungut dari pihak pencari keadilan dalam hal ini Pemohon dan atau Penggugat yang pemungutannya digabungkan dengan panjar biaya perkara.

Biaya Proses tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses penyelesaian khusus perkara perdata yang dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Untuk Pengadilan Negeri Bantul besarnya Biaya Proses ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Besaran Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul dengan rincian singkat sebagai berikut :

- Perkara Permohonan : Rp 110.000,-
- Perkara Gugatan : Rp 110.000,-
- Upaya Hukum Banding : Rp 110.000,-
- Upaya Hukum Kasasi : Rp 150.000,-
- Peninjauan Kembali : Rp 150.000,-
- Eksekusi Riil : Rp 110.000,-

Adapun realisasi biaya proses pada Pengadilan Negeri Bantul sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	Saldo per 30 Juni 2023	0		0
2	Juli 2023	5.300.000	5.300.000	0
3	Agustus 2023	5.800.000	5.800.000	0
4	September 2023	4.200.000	4.200.000	0
5	Oktober 2023	3.850.000	3.850.000	0
6	Nopember 2023	4.900.000	4.900.000	0
7	Desember 2023	3.350.000	3.350.000	0
	JUMLAH	27.400.000	27.400.000	0

Sementara itu, mutasi Biaya Proses sampai pada 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2023	0
Mutasi Tambah	
- Diterima biaya proses	27.400.000
Mutasi kurang	
- Biaya Proses/ ATK/ Pemberkasan	27.400.000
Saldo per 31 Desember 2022	0

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Rp. 27.400.000,- merupakan penerimaan biaya proses sebanyak 83 perkara gugatan, 22 perkara gugatan sederhana, 183 perkara permohonan, 8 perkara Eksekusi, 8 perkara eksekusi hak tanggungan, 8 perkara banding, 4 perkara kasasi.
- Pengurangan Rp. 27.400.000,- merupakan biaya proses baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi dan PK.

F.2.5 REVISI DIPA

Rincian tentang informasi mengenai revisi DIPA disajikan dalam laporan pendukung Catatan atas laporan keuangan ini.

F.2.6 RALAT SPM, SSBP, SSPB

Tidak terdapat ralat SPM,SSBP dan SSPB pada periode Laporan Keuangan ini dibuat.

F.2.7 CATATAN PENTING LAINNYA

Tidak terdapat catatan penting lainnya yang perlu diungkapkan pada periode Laporan Keuangan ini dibuat.